



KARAKTERISTIK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN SOSIAL MASYARAKAT DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG

Chika Andri Sani¹, Endah Purwaningsih²

¹Program Studi Geografi, FIS, Universitas Negeri Padang,

Email: chikaandrisani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat rumah tidak layak huni di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. (2) menyajikan data rumah tidak layak huni dalam bentuk web-gis di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: (1) teknik observasi yang berguna untuk mengamati suatu objek yang akan diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. (2) wawancara yang berguna untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab antara penanya dengan narasumber yaitu kepala rumah tangga rumah tidak layak huni. (3) dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian antara lain jumlah penduduk, cuaca, peta dan yang berhubungan dengan rumah tidak layak huni, teknik analisis data dengan tahap editing data, persentase data. Berdasarkan hasil penelitian 1) terdapat 46 data rumah tidak layak huni terbagi menjadi 3 golongan kondisi rumah, yaitu (1) golongan rumah dengan status tanah bukan milik sendiri tetapi kondisi rumah memang layak untuk diberikan bantuan rehabilitasi rumah sebanyak 15,21%. (2) golongan rumah dengan status tanah milik sendiri dengan kondisi rumah belum begitu rusak sebanyak 60,86%. (3) golongan rumah yang mana kondisi rumahnya masih bagus sebanyak 23,91% sehingga belum membutuhkan untuk diberi bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. 2) Penyajian data dalam bentuk web GIS bisa diakses melalui link: <https://gcp-australia-southeast1.app.carto.com/map/3064128e-e5a7-4358-a132-4b2a3885c034>.

Kata kunci: rumah tidak layak huni, rehabilitasi

ABSTRACT

This study aims to: (1) find out the social community of uninhabitable houses in Koto Tangah District, Padang City. (2) presents data on uninhabitable houses in the form of web-gis in Koto Tangah District, Padang City. This research is a quantitative descriptive study. Data collection techniques are carried out in three stages, namely: (1) observation techniques that are useful for observing an object to be studied either directly or indirectly. (2) interviews that are useful for obtaining information by means of questions and answers between the questioner and the resource person, namely the head of the household, the house is unfit for habitation. (3) documentation is used to obtain data on things or related to the research topic, including population, weather, maps and those related to uninhabitable houses, data analysis techniques with data editing stages, data percentages. Based on research results 1) there are 46 data on uninhabitable houses in Koto Tangah District, Padang City, into 3 groups of house conditions, namely (1) the group of houses with the status of land that is not owned by themselves but the condition of the house deserves to be given home rehabilitation assistance as much as 15.21%. (2) the group of houses with the status of self-owned land with the condition of the house not being so damaged as much as 60.86%. (3) the group of houses where the condition of the house is still good as much as 23.91% so that they do not need to be given assistance to rehabilitate uninhabitable houses. 2) Presentation of data in the form of web GIS can be accessed via the following link: <https://gcp-australia-southeast1.app.carto.com/map/3064128e-e5a7-4358-a132-4b2a3885c034>.

Keywords: uninhabitable houses, rehabilitati

¹Mahasiswa Program Studi Geografi

²Dosen Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Kemiskinan menjadi masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, kemiskinan tidak hanya terjadi di kota saja namun juga di pedesaan. Menurut Ahmadi (2003: 344) Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak sebagai indikatornya yaitu tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran masyarakat, dan tingkat perumahan masyarakat yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam rumah layak huni.

Kota Padang memiliki 104 kelurahan dan 11 kecamatan, yaitu Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, Pauh, Koto Tangah, dengan beberapa kecamatan tersebut peneliti sudah melakukan penelitian di Kecamatan Koto Tangah yang diambil dari data BPS 2020 sebanyak 197.005 jiwa, berdasarkan pengamatan di lapangan peneliti menemukan banyaknya perbedaan antar rumah di setiap masyarakat setempat salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya ketidaksamaan antar masyarakat adalah faktor ekonomi yang sehingga masih adanya masyarakat yang belum bisa memiliki rumah yang dikategorikan layak untuk dihuni yang bisa memberikan rasa kenyamanan jika berada di dalam rumah tersebut. Pada dasarnya rumah tidak layak huni memang akan dapat mengakibatkan adanya dampak negatif yang membahayakan penghuni rumah

tidak layak huni tersebut dengan contoh kejadian alam yang tidak pernah bisa diketahui kapan datangnya misalnya kejadian gempa, tidak semua rumah tidak layak huni tersebut akan mendapatkan bantuan dikarenakan jika ada rumah yang sudah termasuk tidak layak huni tetapi dengan status tanah bukan milik sendiri tidak mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni tersebut, karena yang lebih didahulukan status tanah milik sendiri jika status tanah bukan milik sendiri itu akan bisa menjadi pertikaian nantinya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kondisi rumah tidak layak huni yang sudah atau dapat bantuan rehabilitasi, oleh karena itu peneliti tertarik atau melakukan penelitian dengan judul **“Karakteristik rumah tidak layak huni berdasarkan sosial ekonomi masyarakat Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.”**

Metode Penelitian

Metode penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian deskriptif digunakan apabila penelitian bertujuan mendeskripsikan data atau menjelaskan peristiwa dan kajian-kajian yang ada pada masa sekarang (Sugiyono, 2007:65). Metode survei merupakan metode yang dilakukan pada populasi tersebut sehingga dapat ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis (I.Made Wiratha: 2006). Sedangkan kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan dengan menggunakan angka-angka kemudian dijelaskan dalam suatu uraian.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proportional random sampling*. Menurut Sugiyono (2013:118) teknik *proporsional sampling* yaitu sampel yang dihitung berdasarkan perbandingan. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, kemudian *simple random sampling* yaitu cara mengambil sampel dengan memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih bagi setiap individu atau unit dalam keseluruhan populasi (Pabundu Tika, 2005: 30). Dalam *proportional random sampling*, penentuan anggota sampel peneliti mengambil wakil-wakil dari tiap-tiap kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya sama disesuaikan dengan jumlah subjek yang ada dalam masing-masing kelompok tersebut (Suharsimi Arikunto, 2007:98).

Analisis data yang digunakan secara kuantitatif karena disini saya akan mendeskripsikan bagaimana gambaran kondisi sosial ekonomi warga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk kategori rumah tidak layak huni, yang dimana disini untuk melakukan analisisnya dilihat dari hasil Pendidikan, Pendapatan, Pekerjaan, Tanggungan dan Usia menggunakan rumus presentase. Adapun cara untuk menentukan jumlah persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase yang diperoleh

n = Jumlah jawaban yang diperoleh

N = Jumlah seluruh responden

100 = Konstanta (Jonathan Sarwono, 2006:139)

Hasil dan Pembahasan:

Tabel 1. Kondisi rumah tidak layak huni

Jenis RTLH	Kondisi RTLH	Angka (unit)	%
Jenis lantai	Plesteran	46	100
Jenis dinding	tembok	26	56,52
	kayu	20	43,47
Jenis atap	seng	46	100

Sumber: data primer olahan, 2021

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat responden bahwa semua kepala rumah tangga yang akan mendapatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki jenis lantai dalam kondisi di plesteran atau bisa dikatakan 100% , akan tetapi meskipun sudah semua responden dengan jenis lantai plesteran masih ada jenis lantai dengan plesteran yang sudah sangat patut untuk diperbaiki. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat responden memiliki jenis dinding yang berbeda-beda ada yang memiliki masih jenis dinding dengan kayu dan ada yang memiliki jenis dinding dengan tembok meski itu masih ada keruskannya, jenis dinding dengan tembok memiliki persentase setengah dari keseluruhan jumlah responden kepala rumah tangga yaitu sebanyak 56,52% , sedangkan untuk jenis dinding dengan kayu memiliki 43,47% dengan demikian untuk jenis dinding masih banyak dengan menggunakan tembok. Dari tabel diatas hasil penelitian oleh responden bahwa seluruh rumah yang termasuk rumah tidak layak huni memiliki jenis atap berupa seng atau disebut 100% jenis atap yaitu seng.

Tabel 2. Kondisi sosial masyarakat

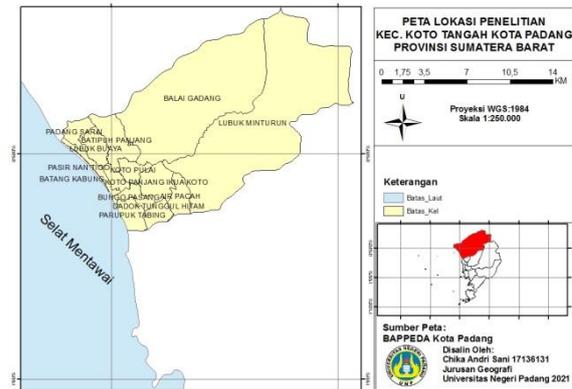
Sosial Masyarakat RTLH		
Pekerjaan	Angka (unit)	%
Buruh Harian	23	50
Ojek/Supir	6	13,04
Tukang/Montir	1	2,17
Nelayan	1	2,17
Irt	15	32,60
Jumlah	46	100

Berdasarkan hasil penelitian diatas ditemukan beberapa jenis pekerjaan kepala keluarga masyarakat tersebut, sebagai berikut: 1) buruh harian lepas dengan banyak 23 orang kepala rumah tangga dan memiliki presentase 50% dari keseluruhan jumlah, 2) ojek/ supir sebanyak 6 orang kepala rumah tangga dengan presentase 13,04%, 3) tukang/montir sebanyak 1 orang dengan presentase 2,17%, 4) nelayan sebanyak 1 orang dengan presentase 2,17% dan irt sebanyak 15 dengan presentase 32,60%, lokasi penelitian tersebut didominasi oleh kepala rumah tangga yang memiliki pekerjaan buruh harian yang sebanyak 50 % dari keseluruhan.

Tabel 3. Sosial RTLH

Sosial Masyarakat RTLH	
kondisi sosial	
Sumber Penerangan	listrik PLN
Tempat Pembuangan	WC
Sumber Air Minum	Pdam,Sumur
Jendela	Ada
Ventilasi	Ada

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sumber penerangan dari rumah tidak layak tersebut berasal dari listrik PLN, untuk pembuangannya masih memiliki WC tiap-tiap rumah, sumber air minum ada yang mengambil dari sumur dan ada yang bersumber dari pdam, dan masih memiliki jendela dan ventilasi di tiap masing-masing rumah.



Gambar 1. Lokasi penelitian

I. Rumah tidak layak huni tingkat pertama

Sebuah rumah yang dikatakan rumah tidak layak huni dengan kategori rumah yang sudah memiliki banyak kerusakan atau rumah yang harus cepat untuk mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah, berikut data rumah tidak layak huni:

Tabel 4. Status kepemilikan rumah tidak layak huni

Tingkat RTH	Status kepemilikan tanah			
	milik sendiri	bukan milik sendiri		
Tingkat 1		7	15,21%	
Tingkat 2	28	60,86%		
Tingkat 3	11	23,91%		
Jumlah	46	100%	46	100%

Sumber: data primer olahan, 2021

Dari hasil penelitian diatas diperoleh bahwa ada 7 jumlah rumah dari 46 keseluruhan rumah yang termasuk kategori rumah tidak layak huni yang berhak mendapatkan rehabilitasi rumah secepatnya, tetapi salah satu penyebab yang menjadi bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari pemerintah tidak terlaksana karena masih adanya status tanah bukan milik sendiri, oleh sebab itu belum bisa dilakukan rehabilitasi pada rumah tersebut supaya nantinya saat

adanya pembangunan tidak terjadi masalah yang akan datang dari berbagai pihak.

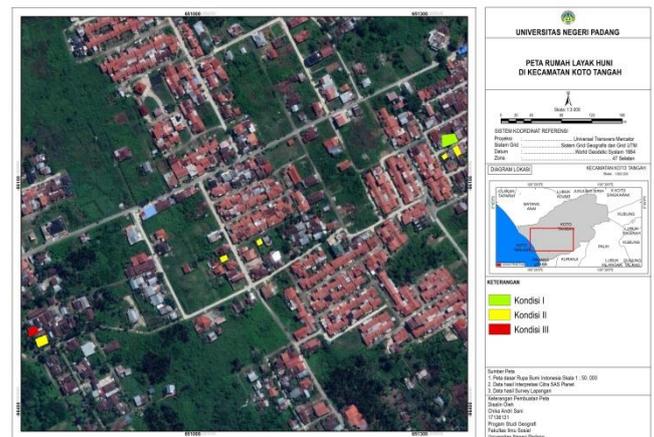
I. Rumah tidak layak huni tingkat kedua

Dalam penelitian ini ada rumah yang memang tidak layak huni tetapi jika dilihat dari segi bangunannya saja masih layak untuk dihuni, tetapi mungkin dari segi ekonomi yang menjadikan sipemilik rumah dianjurkan oleh RT atau RW setempat untuk mengajukan bantuan rehabilitas rumah tidak layak huni agar bisa diperbaiki.

Dari hasil penelitian dilihat bahwa rumah tidak layak huni dengan status tanah milik sendiri yang termasuk bangunan rumahnya bisa diperbaiki, meskipun kondisi belum begitu rusak atau masih layak untuk dihuni yang dimana dilihat dari hasil persentase bahwa rumah dengan status tanah bukan milik sendiri yaitu sebesar 60,86%.

II. Rumah tidak layak huni tingkat ketiga

Dalam hal ini rumah tidak layak huni tingkat yang dimaksud adalah yang dimana kondisi rumah dari segi bangunannya masih terlihat bagus untuk dihuni atau tidak perlu perbaikan yang begitu cepat, akan lebih baiknya jika didahulukan rumah yang memang kondisi bangunannya sudah rusak parah dapat disimpulkan bahwa banyak kesempatan yang terbuang untuk rumah tidak layak huni yang lebih patut untuk diberikan bantuan rehabilitas rumah terlebih dahulu, dari hasil yang didapat bahwa 23,91% dari 100% rumah tidak layak huni yang memiliki kondisi bangunan yang masih aman untuk dihuni.



Gambar 2. Peta rumah tidak layak huni

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai karakteristik rumah tidak layak huni di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Karakteristik rumah tidak layak huni menurut BPS dapat dilihat dari kondisi bangunan yaitu, jenis atap, jenis lantai, dan jenis dinding dari hasil penelitian tersebut sipenulis dapat mengelompokkan kategori rumah tidak layak huni yang bertujuan agar bisa membantu pemerintah dalam menjalankan programnya untuk rehabilitas rumah tidak layak huni tersebut, yaitu untuk tingkat I dengan status bukan tanah milik sendiri yaitu sebesar 15,21% yang dimana sebenarnya disini kondisi rumahnya patut untuk diberikan bantuan rehabilitas rumah, akan tetapi karena status tanah yang dimilikinya bukan milik sendiri oleh sebab itu belum mendapatkan bantuan rehabilitas tersebut, tingkat II dengan status tanah milik sendiri sebesar 60,86% yang dimana kondisi rumah masih layak untuk huni atau dapat dikatakan bahwa kondisi

bangunanya masih aman dan tingkat III dengan masih kondisi tanah milik sendiri sebesar 23,91% akan tetapi disini sangat disayangkan bahwa kondisi rumahnya masih sangat bagus lebih baik diberikan kepada rumah yang memang kondisi bangunanya sudah rusak .

Berdasarkan sosial masyarakat di lokasi penelitian ditemukan bahwa dari 46 kepala keluarga rumah tidak layak huni dengan memiliki pekerjaan buruh harian sebanyak 23 orang dari 46, untuk pekerjaan ojek/supir ada 6 orang dari 46, sedangkan pekerjaan tukang/montir hanya 1 orang dari 46 begitu juga dengan jenis pekerjaan nelayan hanya 1 orang dari 46,

b) Penyajian data dalam WEB-Gis

Memfaatkan teknologi dalam menyajikan data dengan menggunakan web gis sangatlah membantu sipenulis dengan adanya data tersebut juga dapat membantu pihak yang akan memberikan bantuan rehabilitas rumah tersebut dari pihak yang akan menerima bantuan rehabilitas rumah tidak layak huni tersebut.

Daftar Rujukan:

- Addo, I. A. (2016). Assessing residential satisfaction among low income households in multi-habited dwellings in selected low income communities in Accra. *Urban Studies*, 53(4), 631-650
- Ardiansyah, A., & MT, S. (2009). *Dampak Kemiskinan Kota Terhadap Perumahan dan Permukiman di Kota-Kota Besar di Indonesia*. *Artik. Bull. TERAS*.
- Astuti, S. P. 2015. *Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah Kota Bandar Lampung Tahun 2014*. [Tesis]. Universitas Lampung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. *Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pembangunan Perumahan Dan Permukiman*. Kajian Hasil Focused Group Discussion.
- Bailey, W. C. (1984). Poverty, inequality, and city homicide rates: Some not so unexpected findings. *Criminology*, 22(4), 531-550.
- Billah, M. A. *Penentuan pemberian dana bantuan untuk rumah tidak layak huni melalui sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode weighted product* (Bachelor's thesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Bintarto, R., & Hadisumarno, S. (1979). *Metode Analisa Geografi*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- BPS. 2020. Data jumlah penduduk . BPS, Kota Padang.
- DPRKPP.2019. Data rumah tidak layak huni. DPRKPP, Kota Padang.
- Faishal, L. (2018). *Implementasi program rehab rumah tidak layak huni kabupaten Semarang tahun 2016* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).
- Fu, P., & Sun, J. (2011). *Web GIS: principles and applications* (pp. 89-114). Redlands: ESRI press.
- Hardiyana, B., & Wibawa, J. C. (2019, November). Designing A Geographical Information System For Houses Not Feasible As Supporters Of Policy. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 662, No. 2, p. 022103). IOP Publishing.
- Jannah, N., Supriadi, O., & Handayani, R. (2017). *Evaluasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Serang tahun TAHUN 2013* (Doctoral dissertation,

- Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Jazuli, A., & Nurkamid, M. (2017). Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Rumah Tidak Layak Huni di Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Demak. *Prosiding SNATIF*, 265-372.
- Jazuli, A., & Nurkamid, M. (2017). Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Rumah Tidak Layak Huni di Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Demak. *Prosiding SNATIF*, 265-372.
- Kristyawati, Y. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Distribusi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada Kab Sampang Menggunakan Metode Vikor. *Inform: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 2(1).
- Mardiati, K. S., & Oktafianto, O. (2017). Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) Pada Kecamatan Ambarawa Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *PROCIDING KMSI*, 5(1).
- Marini, R. (2021). *Analisis faktor penghambat implementasi dana alokasi khusus pada kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni Di Kota Solok* (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta).
- Miswar Miswar, D., Sudarmi, S., Yarmaidi, Y., Aristoteles, A., & Rahman, R. F. (2021). Social Geography Study On The Distribution Of Uninhabitable Houses In Landslide Prone Areas, Kelumbayan District, Tanggamus Regency. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 25(2), 698-714.
- Narimawati, U., Sarwono, J., Munandar, D., & Winarti, M. B. (2020). *Metode Penelitian dalam Implementasi Ragam Analisis: untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*.
- Nisa, A. F., & Setyadharma, A. (2020). Benefit Incidence Analysis of Uninhabitable Houses Rehabilitation Program in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 1399-1408.
- Peraturan Walikota Padang nomor 46 tahun 2015 tentang *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*
- Putri, A. A., Fosterharoldas, D., & Roychansyah, S. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Perumahan Swasta Du Kota Padang. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 10(2), 57-66
- Subagijo, E. (2016). Manual Anatomi Rumah Sehat Layak-Huni (Liveable) Di Perkampungan Kota. *Jurnal Spectra*, 14(28), 1-18.
- Sugihartono, T. (2018). Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 7(1), 52-56.
- Szelényi, I. (1978). Social inequalities in state socialist redistributive economies- Dilemmas for social policy in contemporary socialist societies of Eastern Europe. *International journal of comparative sociology*, 19, 63.
- Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 1-21.
- Undang-Undang RI No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Wibawa, J. C., & Hardiyana, B. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Rumah Tidak Layak Huni Sebagai Pendukung Keputusan

- Kebijakan Di Tingkat Desa. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 5(1).
- Yahya, F., Prabawa, S. E., Mahardianti, M. A., & Alina, A. N. (2020). *Pemetaan Kawasan Wilayah Permukiman Rumah Tidak Layak Huni Di Perdesaan* (Studi Kasus: Kecamatan Palengaan Dan Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan). *Elipsoida: Jurnal Geodesi dan Geomatika*, 3(2).
- Yulisman, Y., & Febriani, A. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Menggunakan Metode SAW di Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi. *Informatika*, 12(1), 39-50.
- Zhou, Y., & Liu, Y. (2019). The geography of poverty: Review and research prospects. *Journal of Rural Studies*.
- Zulfika, Z., Jafra, R. A., & Candra, A. (2021). Evaluasi kelayakan penerima bantuan program rumah sehat layak hauni terhadap pemilik bangunan Di Kecamatan Sentajo Raya. *Jurnal planologi dan sipil (JPS)*, 3(2), 114-121.

